RUU TENTANG JABATAN HAKIM

AKD: RUU TENTANG JABATAN HAKIM

Bulan: September 2020

Oleh: RUU TENTANG JABATAN HAKIM

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Komisi III Usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Kompas.com - 30/06/2020, 17:58 WIB

Penulis Tsarina Maharani, Editor Kristian Erdianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan dan RUU tentang Jabatan Hakim masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal tersebut disampaikan pimpinan Komisi III dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR. "Ada dua usulan baru yang masuk dari Komisi III, yaitu usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim. Kalau bisa," kata Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya, saat dihubungi, Selasa (30/6/2020).

Sementara itu, saat ini ada dua RUU yang semestinya dibahas Komisi III bersama pemerintah, yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Namun, kedua RUU yang merupakan inisiatif pemerintah itu belum kunjung dibahas. Diketahui, RUU KUHP dan RUU PAS berstatus carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya. "Dua RUU ini usul pemerintah, besok akan ditanyakan khusus untuk KUHP dan PAS kepada pemerintah," ucap Willy.

Evaluasi Prolegnas Prioritas ini sesuai dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan UU PPP, Prolegnas dapat dievaluasi tiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas tahunan. Evaluasi dilakukan dengan mengeluarkan atau menambahkan RUU dalam daftar prolegnas. Willy menjelaskan, RUU yang diusulkan dihapus adalah rancangan yang belum dibahas atau tidak akan dibahas hingga Oktober 2020.

Ia mengatakan, RUU yang telah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 nantinya dapat diusulkan kembali untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021. Berbagai usulan-usulan dalam rapat hari ini akan dibahas dalam rapat kerja bersama pemerintah pada Kamis (2/7/2020) mendatang. "Ini belum tripartit. Bukan di-drop ya, tapi dikomunikasikan untuk dimasukkan Prolegnas tahun berikutnya karena tidak keburu sampai Oktober kalau melihat status dan dinamika di masing-masing komisi. Keputusannya nanti di raker tripartit hari Kamis," ujarnya.

Untuk diketahui, Prolegnas Prioritas 2020 terdiri atas 50 RUU yang terdiri atas usul DPR, DPD, dan pemerintah. Berdasarkan rapat hari ini, ada sejumlah RUU inisiatif DPR yang diusulkan dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. RUU yang disulkan dihapus yaitu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dibahas Komisi VIII serta RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan yang dibahas Komisi IV. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di-drop. Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021," kata Willy.

Kemudian, RUU tentang Jalan yang dibahas Komisi V. Willy mengatakan, RUU tentang Jalan sebetulnya sudah mulai dibahas, tetapi kemungkinan akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 jika tidak dapat diselesaikan hingga Oktober. "Komisi V RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jalan, RUU tentang Jalan juga. Tapi kita minta kepastian lagi, apakah ini selesai Oktober. Kalau tidak, nanti RUU tentang Jalan akan di-drop," ucapnya. Berikutnya, RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dibahas Komisi IX, RUU tentang Gerakan Pramuka yang dibahas Komisi X, dan RUU tentang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian serta RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dibahas Komisi XI. "Komisi XI, RUU Bea Materai jalan karena itu (usul) pemerintah. Kemudian dua di-drop yaitu, RUU Perpajakan dan Penguatan Pereknomian dan RUU tentang OJK," ujar Willy.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/17584301/komisi-iii-usul-ruu-kejaksaan-dan-ruu-jabatan-hakim-masuk-prole

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi III DPR (RUU Jabatan Hakim Belum Dibahas, Kenapa Sampai Ada Isu Pemerasan)	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/16326
Berita	Banyak duplikasi dari undang-undang lain	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26142
Berita	Batasi Usia Pensiun 'Wakil Tuhan': Komisi III Ngebut Selesaikan RUU Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22577
Berita	Disepakati Baleg, RUU Jabatan Hakim mulai dibahas di Senayan	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25025
Berita	DPR akan mensahkannya pada akhir 2016	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26140
Berita	DPR Bahas RUU Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23578
Berita	DPR Dukung Presiden Keluarkan Perppu Darurat Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23188
Berita	DPR Geber RUU Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35359
Berita	DPR Mulai Bahas RUU Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22583
Berita	DPR Sepakat Perkuat Peran KY	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25680
Berita	Evaluasi Pembinaan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25678
Berita	Jabatan Hakim Agung Dibatasi Lima Tahun - Panja DPR Mulai Bahas RUU Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25934
Berita	Jabatan Hakim Seumur Hidup Rawan Penyimpangan	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26323
Berita	Kebut RUU Jabatan Hakim: Komisi III Jaring Masukan Dari Pengadilan Di Jabar	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35516
Berita	KY menolak diperlemah	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/21971
Berita	KY Minta Tambah Kewenangan Eksekusi	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25705
Berita	Legislasi: Substansi RUU Jabatan Hakim Picu Resistensi	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25807
Berita	Masa Jabatan: Uji Materi Diduga Konflik Kepentingan	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26294
Berita	Panja RUU Jabatan Hakim Dibentuk	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/28788
Berita	Partai Pendukung Pemerintah Diminta Dorong Pengesahan RUU Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36390
Berita	Pemerintah terlihat gamang, RUU Jabatan hakim sulilt disahkan cepat	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35556
Berita	Pemerintah-DPR Sepakat Batasi Masa Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/27636
Berita	Peradilan Rentan Intervensi	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/30413
Berita	Perbaiki MA: KY Akan Diberi Hak Eksekusi Sanksi	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23584
Berita	Perjalanan RUU Jabatan Hakim yang Belum Selesai	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26648
Berita	Prolegnas : KY Desak DPR Tuntaskan RUU Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/18501
Berita	RHakim: Parlemen Perkuat Pengawasan Eksternal Hakim	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23538
Berita	Roda Legislasi: Anggaran Pemerintah belum siap. RUU Jabatan Hakim sulit dirampungkan	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35514
Berita	Roda Legislasi: RUU Jabatan Hakim Diputus Pekan Depan	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36360
Berita	RUU Jabatan Hakim - Pakar : Tidak Perlu Dibahas	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22383

Berita	RUU Jabatan Hakim - Pengawasan KY demi Akuntabilitas Peradilan	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/35374
Berita	RUU Jabatan Hakim Diharapkan Perkuat Aspek Integritas	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/12426
Berita	RUU Jabatan Hakim Diharapkan Untungkan Penegakkan Hukum	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/23867
Berita	RUU jabatan hakim. Pengawasan KY diusulkan diperkuat	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/23437
Berita	RUU Jabatan Hakim: Mahkamah Agung Tolak Penurunan Usia Pensiun Hakim Agung	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/21487
Berita	RUU Jabatan Hakim: manajemen kehakiman jangan dimonopoli MA	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/28643
Berita	RUU Jabatan Hakim: Pengawasan Eksternal Diperkuat	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/23119
Berita	RUU Jabatan Hakim: Periodisasi Jabatan Untuk Menjaga Hakim	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/23441
Berita	RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Hakim Agung Jadi 67 Tahun	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/21461
Berita	Sepakat Batasi Jabatan Hakim	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/27648
Berita	UU Jabatan Hakim : KY Minta Penambahan Kewenangan	https://kliping.dpr.go.id/inde\nx/detail/id/26024